

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RANCANGAN AKHIR RENJA - PD

RANHIR RENJA

TAHUN 2024

**KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT DARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja Akhir (RANHIR) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kota Bangun Induk Tahun 2022 – 2026.

Demikian Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024.

Kota Bangun Darat, Agustus 2023
Camat Kota Bangun Darat



KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT
KUTAI KARTANEgara
19750201 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....II

BAB I 1

P E N D A H U L U A N 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan2

1.4 Sistematika Penulisan3

BAB II 4

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah.....4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. 12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....21

BAB III.....25

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEAH25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....26

BAB IV28

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH28

4.1 Program dan Kegiatan28

BAB V36

PENUTUP36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kota Bangun Darat menyusun Renja OPD Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kota Bangun Darat. Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kecamatan.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang SIPD.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat.
 17. Surat Edaran Bupati No.B-2588/BPKAD/BAN.I/065.11/09/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini adalah Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Kota Bangun Darat selama tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Kecamatan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah untuk Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Kota Bangun Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kantor Camat Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi anggaran Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021 masih menggunakan hasil dari Kota Bangun induk yang mana ada beberapa desa yang dulunya masih tergabung dalam Kecamatan Kota Bangun Induk, oleh sebab itu Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih tergabung dalam Kota Bangun Induk Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2022)	
					Target Renja-PD Tahun 2021	Realisasi Renja-PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
7 01	Urusan Kecamatan									
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100		100	100	100	100	100	100
		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	71,43		71,43	71,43	100	78,5	78,5	100
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	11		1	1	100	2	2	2
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	7200		1200	1200	100	1200	2400	33,33
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100		100	100	100	100	100	100
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan	12		2	2	100	2	2	2
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	900		150	150	100	150	300	33,33
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	13		5	5	100	4	9	69,23
7 01 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB		B	B	100	B	B	B

7	01	01.	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131		21	21	100	22	22	22
7	01	01.	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13		3	3	100	2	5	38,46
7	01	01.	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26		6	6	100	4	10	38,46
7	01	01.	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72		12	12	100	12	24	33,33
7	01	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	112		12	12	100	20	20	20
7	01	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	216		36	36	100	36	72	33,33
7	01	01.	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	102		12	12	100	18	30	29,41
7	01	01.	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	92		12	12	100	16	16	16
7	01	01.	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	32		12	12	100	4	16	50,00
7	01	01.	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	300		50	50	100	50	50	50
7	01	01.	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270		20	20	100	50	70	25,93
7	01	01.	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	61		7	7	100	10	10	10
7	01	01.	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	31		6	6	100	5	11	35,48
7	01	01.	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	90		15	15	100	15	30	33,33
7	01	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	90		15	15	100	15	30	33,33
7	01	01.	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12		2	2	100	2	4	33,33
7	01	01.	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12		2	2	100	2	4	33,33
7	01	01.	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	2100		100	100	100	400	500	23,81
7	01	01.	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	7200		1200	1200	100	1200	2400	33,33
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang	360		60	60	100	60	60	60

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat program dan kegiatan yang melebihi target, terdapat beberapa program dan kegiatan yang memenuhi target dan beberapa program dan kegiatan yang tidak memenuhi target. Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Nilai pagu pada APBD lebih kecil dari nilai pada Renja.

Hal-hal yang diambil dalam mengatasi hal-hal tersebut adalah:

1. Melakukan pergeseran anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Mengurangi dan menghapus beberapa sub kegiatan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat yaitu meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:

1. Bidang ketenagakerjaan, pelayanan pemberian kartu pendaftaran I(AK/1) kepada pencari kerja;
2. Bidang pekerjaan umum, pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tinggal;
3. Bidang Perhubungan;
4. Bidang pertanahan, pemberian pelayanan melegalisir serta memproses surat pelepasan hak atas tanah di wilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah;
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri, dengan pelayanan pemberian penerbitan izin gangguan usaha (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
7. Bidang otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian meliputi pemberian pelayanan pemungutan pendapatan daerah.

Urusan pilihan adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan, yang meliputi bidang:

1. Pertanian;
2. Energi dan Sumberdaya Mineral;
3. Pariwisata, pemberian izin usaha pariwisata yang dikelola oleh perseorangan;
4. Perindustrian dan Perdagangan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat selama kurun waktu tahun 2021. Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat, yaitu :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP;
- c. Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan;
- d. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif;
- e. Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan;
- f. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- g. Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kota Bangun Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian	Proyeksi
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan			N/A	82	83	84	85	N/A	82
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			N/A	100	100	100	100	N/A	100
3	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			N/A	100	100	100	100	N/A	100
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			N/A	5,5	6	6,5	7	N/A	5,5
5	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			N/A	0	0	0	0	N/A	0
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			N/A	64	66	68	70	N/A	64
7	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			N/A	100	100	100	100	N/A	100
8	Tingkat Aksebilitasi Wilayah Kecamatan			78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
9	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			100	100	100	100	100	100	100

10	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan			0	100	100	100	100	N/A	0
11	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0	100	100	100	100	N/A	0
12	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik			42,8	57,1	71,4	71,4	85,7	42,8	42,8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Bangun Darat berpedoman kepada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Yaitu disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selanjutnya mengenai fungsi diuraikan pada pasal berikutnya yaitu di pasal 4 yang berbunyi Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

a. Permasalahan dan Hambatan

Identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Kota Bangun Darat dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan adalah:

1) Bidang Pemerintahan

- Belum optimalnya pembinaan aparatur desa
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan
- Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah dan sengketa tanah
- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan
- Belum optimalnya pengelolaan arsip kecamatan secara baku

- Beban kerja belum merata untuk semua jabatan terutama yang menangani keuangan dan bidang lainnya.
 - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur kecamatan
- 2) Bidang Ekonomi
- Kondisi geografis antar wilayah dalam kecamatan yang berjauhan sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
 - Infra struktur bangunan Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih dalam tahap perencanaan, dan Jalan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan yang masih banyak mengalami kerusakan sehingga akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Bidang Kesra
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur desa dan/atau kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
 - Minimnya data dan informasi dari desa dan atau kelurahan
- 4) Bidang Aset Pemerintahan
- Minimnya sarana dan prasarana sosial, umum, dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah
- 5) Bidang Pelayanan
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN
 - Masih kurangnya kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan PATEN sesuai SOP
- b. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Kota Bangun Darat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain:
- 1) Terkait dengan belum adanya infra struktur bangunan Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih dalam tahap perencanaan, sehingga akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Infra struktur Jalan yang menghubungkan antar desa dan kecamatan yang masih banyak mengalami kerusakan sehingga menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat.
 - 3) SDM yang bekerja di Kantor Kecamatan belum terpenuhi seluruhnya juga menghambat penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan.
- c. Tantangan dan Peluang
- Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kota Bangun Darat. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 1) Sumber Daya Manusia yang mempunyai pendidikan yang memadai dan semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
 - 2) Peranan Pemerintah Kabupaten yang sangat mendukung untuk meningkatkan kemajuan Kecamatan dalam membangun wilayah kecamatan baru.

Sedangkan peluang yang bisa didapatkan adalah :

- 1) Kepemimpinan yang mempunyai jangkauan ke depan (visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang inspiratif.
- 2) Optimalisasi ketersediaan sumber daya manusia yang ada agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja.

d. Formulasi isu-isu penting

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diperoleh isu-isu strategis pada tahun 2024 yang dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan penganggaran. Beberapa isu strategis Kecamatan Kota Bangun Darat tahun 2024 sebagai tugas dan fungsinya antara lain:

- 1) Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada perangkat desa
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan
- 3) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani sengketa lahan
- 4) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan
- 5) Mengikuti bimtek dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
- 6) Mengusulkan pembangunan di desa melalui musrenbang
- 7) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelayanan PATEN

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2024 review rancangan akhir RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran.

Tabel. T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
	KECAMATAN						KECAMATAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Nilai	6.419.710.888	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	Nilai	6.369.710.888	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	dokumen	180.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	dokumen	180.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	60.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	20.000.000	

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	20.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	20.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	laporan	4.060.071.560	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	laporan	4.060.071.560	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	Orang/bulan	3.911.351.560	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	Orang/bulan	3.911.351.560	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	8.000.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan	140.720.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan	140.720.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500	unit	49.160.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	500	unit	49.160.000	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	Laporan	49.160.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13	Laporan	49.160.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	10	orang	58.690.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	10	orang	58.690.000	

2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	0	
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun Darat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	58.690.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bangun Darat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	58.690.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24	Unit	1.020.850.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	24	Unit	820.850.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	10.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket	247.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket	247.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	50.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	75.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	8.850.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bangun Darat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	8.850.000	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	40.000.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	510.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	310.000.000	Dikurangi 150.000.000,- Untuk sewa Rumah Dinas Jabatan 3 Unit + di Kurangi 50.000.000,- Untuk Kegiatan Musrembang Kecamatan.
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	Dokumen	50.000.000	

11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	30.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	30.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	16	unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	16	unit	150.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	Unit	0	
9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	150.000.000	di Tambah Untuk sewa Rumah Dinas Jabatan 3 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	730.939.328	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	730.939.328	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	500.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	225.939.328	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	225.939.328	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14	unit	320.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	14	unit	320.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bangun Darat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	300.000.000	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bangun Darat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	20.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	Persen	8.887.403.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	10 0	Persen	8.887.403.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25	kegiatan	8.887.403.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	25	kegiatan	8.887.403.000	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	1.007.403.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4	Laporan	1.007.403.000	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39	Laporan	7.880.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	39	Laporan	7.880.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	Persen	368.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	10 0	Persen	418.500.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12	Kali	368.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	12	Kali	418.500.000	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3	Lembaga	50.000.000	di Tambah Untuk Kegiatan Musrebang Kecamatan.
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	368.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	368.500.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	Persen	206.630.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10 0	Persen	206.630.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	Kegiatan	206.630.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	1	Kegiatan	206.630.000	

4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5	kegiatan	181.630.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun Darat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5	kegiatan	181.630.000	
8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen	25.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	0	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	10	Desa	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa Yang difasilitasi	10	Desa	0	
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen	0	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Kota Bangun Darat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen	0	
						15.882.243.888						15.882.243.888	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan uu nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif.

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

1. Musrenbang tingkat kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akan disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memformulasikan usulan program/kegiatan mereka.;
3. Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu II s/d minggu IV bulan Februari);
4. Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama Paket	Wilayah	Target	Pagu	Tematik	Ket	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa Sedulang RT.002, Kecamatan Kota Bangun Darat	Sedulang	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2	Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Desa Sedulang RT.001, Kecamatan Kota Bangun Darat	Sedulang	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
3	Pembangunan Jembatan Desa Wonosari Kecamatan Kota Bangun Darat	Wonosari	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
4	Drainase jalan Lingkungan RT.06 Wonosari	Wonosari	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman Desa Sumber Sari RT 003 Kecamatan Kota Bangun Darat	Sumber Sari	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
6	Pembangunan/peningkatan jalan usaha tani Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun Darat	Sumber Sari	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
7	Drainase jalan Lingkungan Jl.Sarawana Anjeng RT.002 Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun Darat	Benua Baru	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
8	Lanjutan Pembangunan Jalan Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
9	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu) DESA KOTA BANGUN III RT 10 Kecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun III	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
10	Pembangunan Saluran Gorong-gorong DESA KOTA BANGUN III RT 7 Kecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun III	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
11	Pembangunan Saluran Drainase DESA KOTA BANGUN III RT 8 Kecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun III	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
12	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman Desa Kota Bangun II RT.003 Kecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
13	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu) Desa Kota Bangun II RT.006 Kecamatan Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
14	Penurapan Jalan (Beton/Pasangan Batu) Jl.A. Yani R.002 Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun Darat	Benua Baru	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
15	Pembangunan Jalan RT.02 Dusun Sukorejo Desa Sari Nadi Kecamatan Kota Bangun Darat	Sari Nadi	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

16	Pembangunan Jalan RT.06 Dusun Sukorejo Desa Sari Nadi, Kec. Kota Bangun Darat	Sari Nadi	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
17	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sukabumi RT 07 Kec. Kota Bangun Darat	Suka Bumi	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
18	Pembangunan Jalan Kecamatan Kota Bangun Desa Sukabumi RT 04 Kec. Kota Bangun Darat	Suka Bumi	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
19	Lanjutan Pembangunan Jalan Dusun Ketapang Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
20	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman RT.006 Dusun Tambah Rejo Kota Bangun I Kec. Kota Bangun Darat	Kota Bangun I	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
21	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman RT.012 Dusun Tegal arum Desa Kota Bangun I Kec. Kota Bangun Darat	Kota Bangun I	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
22	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Kantor BUMDES/Polindes Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	1	200.000.000		Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Balai Adat Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	1	200.000.000		Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
24	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan Perumahan dan Permukiman RT.008 Desa Kota Bangun II Kec. Kota Bangun Darat	Kota Bangun II	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
25	Pembangunan Jembatan Usaha Tani Kutai Raya Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun Darat	Sumber Sari	1	200.000.000	MS_Infrastruktur	Directive 2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
26	Semenisasi Jalan Utama Desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun (Pokir Betaria M)	Kedang Ipil	1	210.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
27	Pengaspalan Jalan Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun (Pokir Betaria M)	Sumber Sari	1	240.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
28	Pembangunan Jalan Desa Wonosari SP 7 Kec. Kota Bangun Darat (Pokir Miftahul Jannah)	Wonosari	1	200.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
29	Pembangunan Jalan Wisata Desa Kedang Ipil (Pokir Miftahul Jannah)	Kedang Ipil	1	230.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
30	Pengerasan Jalan RT. 1 Desa Sari Nadi Kec. Kota Bangun (Pokir Miftahul Jannah)	Sari Nadi	1	200.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
31	Semenisasi Jalan Desa Kota Bangun I Kec. Kota Bangun (Pokir Miftahul Jannah)	Kota Bangun I	1	200.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
32	Semenisasi Jalan RT. 11 Desa Sari Nadi Kec. Kota Bangun (Pokir Miftahul Jannah)	Sari Nadi	1	200.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

33	Penurapan dan Pengurukan Desa Wonosari Kec. Kota Bangun Darat (Miftahul Jannah)	Wonosari	1	200.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
34	Normalisasi Parit Desa Sedulang Kec. Kota Bangun (Miftahul Jannah)	Sedulang	1	200.000.000	Pokir	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
35	Normalisasi Parit Desa Wonosari Kec. Kota Bangun (Miftahul Jannah)	Wonosari	1	200.000.000	Pokir	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
36	Normalisasi Parit Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun (Pokir Miftahul Jannah)	Sumber Sari	1	200.000.000	Pokir	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
37	Normalisasi Parit Desa Kota Bangun 1 Kec. Kota Bangun (Pokir Miftahul Jannah)	Kota Bangun I	1	200.000.000	Pokir	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
38	Semenisasi Jalan ke Lapangan Sepak Bola Desa Kota Bangun III Dusun Jambu Rejo RT. 05, Kab. Kutai Kartanegara(Pokir Mutoyib)	Kota Bangun III	1	200.000.000	Pokir MS_Infrastruktur	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
39	Pembangunan Gapura Desa Kota Bangun III Dusun Kebon Rejo RT. 5, Kab. Kutai Kartanegara (Pokir Mutoyib)	Kota Bangun III	1	200.000.000	Pokir	Pokir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
TOTAL			39	7.880.000.000			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai mana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 – 2025. Oleh sebab itu penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara masa bakti tahun 2021 – 2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 -2025 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 tahun 2010 tentang RPJPD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 – 2026 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dok perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan daerah.

RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan RPKD, yang merupakan Rencana Pembangunan tahunan daerah, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam Priode 2022 – 2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan. Maka untuk itu Tujuan strategis Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel”

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kurtai Kartanegara Tahun 2024 adalah :

“Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan”

Tabel 3.1

Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel		Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kota Bangun Darat sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kota Bangun Darat diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun Darat merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.
 - b) Pencapaian SDGs.
 - c) Pengentasan kemiskinan.
 - d) Pencapaian SPM.
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 adalah 4 Program dengan 11 Kegiatan dan 43 sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun Darat sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kota Bangun Darat dan melingkupi semua Desa.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Renja Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp. 15.882.243.888,00
- c. Tabel rencana program dan kegiatan sebagaimana format table berikut ini:

Tabel. T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perangkat Daerah : Kecamatan Kota Bangun Darat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
					UNSUR KEWILAYAHAN										
					KECAMATAN										
7	1	01.00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		62	Nilai	6.369.710.888	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		62	Nilai	6.369.710.888
7	1	01.00	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14	dokumen	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		14	dokumen	180.000.000
7	1	01.00	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	3	Dokumen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3	Dokumen	60.000.000
7	1	01.00	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	1	Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Dokumen	20.000.000
7	1	01.00	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bangun Darat	1	Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Dokumen	20.000.000

7	1	01.00	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	1	Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Dokumen	20.000.000
7	1	01.00	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bangun Darat	1	Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Dokumen	20.000.000
7	1	01.00	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bangun Darat	6	Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6	Laporan	20.000.000
7	1	01.00	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bangun Darat	1	Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Laporan	20.000.000
7	1	01.00	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		20	laporan	4.060.071.560	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		20	laporan	4.060.071.560
7	1	01.00	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bangun Darat	43	Orang/bulan	3.911.351.560	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		43	Orang/bulan	3.911.351.560
7	1	01.00	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bangun Darat	2	Laporan	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2	Laporan	8.000.000

7	1	01.00	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bangun Darat	13	Laporan	140.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13	Laporan	140.720.000
7	1	01.00	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		500	unit	49.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		500	unit	49.160.000
7	1	01.00	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bangun Darat	13	Laporan	49.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13	Laporan	49.160.000
7	1	01.00	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian		10	orang	58.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	orang	58.690.000
7	1	01.00	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bangun Darat	5	Paket	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5	Paket	0
7	1	01.00	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bangun Darat	10	Orang	58.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	Orang	58.690.000
7	1	01.00	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		24	Unit	820.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		24	Unit	820.850.000
7	1	01.00	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bangun Darat	5	Paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5	Paket	10.000.000
7	1	01.00	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bangun Darat	13	Paket	247.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13	Paket	247.000.000

7	1	01.00	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bangun Darat	3	Paket	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3	Paket	50.000.000
7	1	01.00	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bangun Darat	1	Paket	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Paket	75.000.000
7	1	01.00	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bangun Darat	2	Paket	8.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2	Paket	8.850.000
7	1	01.00	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bangun Darat	12	Laporan	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Laporan	40.000.000
7	1	01.00	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bangun Darat	12	Laporan	310.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Laporan	310.000.000
7	1	01.00	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bangun Darat	500	Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		500	Dokumen	50.000.000
7	1	01.00	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bangun Darat	1	Dokumen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Dokumen	30.000.000
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		16	unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		16	unit	150.000.000
7	1	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bangun Darat	13	Unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13	Unit	0
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bangun Darat	3	Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3	Unit	150.000.000
7	1	01.00	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	bulan	730.939.328	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	bulan	730.939.328

7	1	01.00	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bangun Darat	12	Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Laporan	5.000.000
7	1	01.00	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bangun Darat	12	Laporan	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Laporan	500.000.000
7	1	01.00	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bangun Darat	12	Laporan	225.939.328	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Laporan	225.939.328
7	1	01.00	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		14	unit	320.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		14	unit	320.000.000
7	1	01.00	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bangun Darat	13	Unit	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		13	Unit	300.000.000
7	1	01.00	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bangun Darat	1	Unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Unit	20.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		100	Persen	8.887.403.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100	Persen	8.887.403.000
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat		25	kegiatan	8.887.403.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		25	kegiatan	8.887.403.000
7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	4	Laporan	1.007.403.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		4	Laporan	1.007.403.000

7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Bangun Darat	39	Laporan	7.880.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		39	Laporan	7.880.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		100	Persen	418.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100	Persen	418.500.000
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan		12	Kali	418.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Kali	418.500.000
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Bangun Darat	3	Lembaga	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		3	Lembaga	50.000.000
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Bangun Darat	6	Laporan	368.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		6	Laporan	368.500.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	Persen	206.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100	Persen	206.630.000
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan		1	Kegiatan	206.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1	Kegiatan	206.630.000
7	1	5	02.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Bangun Darat	5	kegiatan	181.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		5	kegiatan	181.630.000

7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Bangun Darat	12	Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12	Dokumen	25.000.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		100	Persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		100	Persen	0
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi		10	Desa	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	Desa	0
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kota Bangun Darat	10	Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		10	Dokumen	0
										15.882.243.888					15.882.243.888

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kota Bangun Induk Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kota Bangun Darat. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kota Bangun Darat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kota Bangun Darat berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Kota Bangun Darat berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Akhir (RANHIR) Kecamatan Kota Bangun Darat selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kota Bangun Darat. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Kota Bangun Darat juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang datang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Kota Bangun Darat ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Kota Bangun Darat serta

memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kota Bangun Darat, Agustus 2024
Camat Kota Bangun Darat

JULKIFLI, SE
NIP. 19750201 199803 1 004